RENCANA K E R J A
PERUBAHAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU

TAHUN 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU
Jl. Gose Gautama NO. 88 Telp. (0624) 2600999

RANTAUPRAPAT

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu TA. 2025 ini merupakan acuan perencanaan program kegiatan selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Rantauprapat, 08 Oktober 2025

KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Drs. DARWIN YUSMA, M. AP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19701003 199101 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I . Pendahuluan
- 1.1 . latar belakang
- 1.2 . Landasan Hukum
- 1.3 . Maksud dan Tujuan
- 1.4 . sistematika penulisan

BAB II . Hasil evaluasi Renja Perubahan BPBD Kabupaten Labuhanbatu
- 2.1 . Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan dan capaian Renstra BPBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025
- 2.2 . Analisis kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Labuhanbatu
- 2.3 . Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Labuhanbatu
- 2.4 . Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III . Tujuan Dan Sasaran BPBD Kabupaten Labuhanbatu
- 3.1 . Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 . Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Labuhanbatu
- 3.3 . Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV . Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan BPBD Kabupaten Labuhanbatu

BAB V . Penutup

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja-SKPD menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan RKPD. Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan untuk kemudian ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

1.2 Landasan Hukum.

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomo 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor Tahun tentang RPJMD Kabupaten Labuhanbatu;
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah

Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 24 Tahun 2016).

1.3 Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan BPBD ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2025 yang memuat sekumpulan kegiatan prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk periode satu tahun anggaran. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025;
2. Sebagai acuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
3. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
4. Merumuskan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu selama tahun 2025 yang mengarah pada pencapaian visi dan misi BPBD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja, output, outcome dan pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Memuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU

Rencana Kerja Perubahan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD yang telah ditetapkan. Renja BPBD Kabupaten Labuhanbatu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Labuhanbatu selama tahun 2025. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur kinerja diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi. Penetapan indikator - indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Capaian kinerja dinilai dari sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis BPBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.

Pada tahun anggaran 2025, total anggaran Rp. 6.089.879.160,- terdiri atas belanja operasi dengan rincian belanja pegawai Rp. 3.156.466.967,-, belanja barang dan jasa Rp. 2.933.412.193,- dan belanja modal peralatan dan mesin Rp. 21.109.626,-,

Jumlah dana tersebut digunakan untuk membiayai terdiri dari 2 Program 10 Kegiatan. Dana yang terserap untuk membiayai kegiatan tersebut sebesar Rp. 3.722.281.702,- atau sekitar 61%.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

URAIAN	Anggaran	Realisasi	Persentase
	(Rp)	(Rp)	(%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**4.036.103.840,-**	**2.721.113.619,-**	**67%**
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**17.755.200,-**	**15.145.432,-**	**85.30%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.993.600,-	6.523.016,-	81.60%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.761.600,-	8.622.416,-	88.33%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.240.106.967,-**	**2.430.907.154,-**	**75%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.156.466.967,-	2.371.287.154,-	75%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.640.000,-	59.620.000,-	74%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,-	0,-	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.500.000,-	0,-	0.00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**0,-**	**0,-**	**0.00%**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,-	0,-	0.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**406.259.948,-**	**163.332.063,-**	**40%**
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.205.188,-	45.733.299,-	43%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.674.760,-	12.539.100,-	45%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000,-	1.640.000,-	46.86%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.880.000,-	5.406.000,-	50%
Penyelenggaraan Rapat	257.000.000,-	98.013.664,-	38%

URAIAN	Anggaran	Realisasi	Persentase
	(Rp)	(Rp)	(%)
Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**97.690.000,-**	**54.592.922,-**	56%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.600.000,-	4.788.000,-	50%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.540.000,,-	33.688.922,-	56%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.550.000,-	16.116.000,-	58%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**274.291.725,-**	**57.136.048,-**	21%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.130.525,-	3.652.400,-	8%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	197.521.200,-	36.123.648,-	18%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.640.000,-	17.360.000,-	53%
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**2.074.884.946,-**	**1.001.168.083,-**	48%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**229.404.700,-**	**17.128.800,-**	7%
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	229.404.700,-	17.128.800,-	7%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**1.473.925.306,-**	**923.603.067,-**	63%
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	25.016.000,-	23.316.000,-	93%
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.210.827.066,-	900.287.067,-	74%
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	238.082.240,-	0,-	0.00%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**166.664.940,-**	**60.436.216,-**	36%
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	75.713.500,-	19.900.000,-	26%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam	27.279.540,-	25.095.000,-	92%

URAIAN	Anggaran	Realisasi	Persentase
	(Rp)	(Rp)	(%)
Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota			
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	63.671.900,-	15.441.216,-	24%
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**204.890.000,-**	**0,-**	**0.00%**
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	46.200.000,-	0,-	0.00%
Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	158.690.000,-	0,-	0.00%
JUMLAH	**6.110.988.786,-**	**3.722.281.702,-**	**61%**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Labuhanbatu.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang telah tertuang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026. Berikut tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya fungsi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	1. Meningkatnya jumlah masyarakat sadar bencana	1. Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi/bimtek kebencanaan	50 Orang	- Orang
			2. Jumlah aparat/perangkat yang mengikuti sosialisasi/bimtek kebencanaan	10 Orang	- Orang
		2. Meningkatnya jumlah desa tangguh	1. Jumlah desa yang telah membentuk organisasi desa tangguh	18 Desa	- Desa
		3. Adanya regulasi yang memadai	1. Review rencana kontijensi (Renkon)	0 Dok	- Dok

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
			2. Adanya/tersusunnya rencana kontijensi (Renkon) untuk masing masing kategori bencana	1 Dok	- Dok
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	1. Tersedianya kebutuhan dasar untuk korban bencana	1. Persentase pemenuhan kebutuhan air	0 %	- %
			2. Persentase pemenuhan kebutuhan sandang	90 %	- %
			3. Persentase pemenuhan kebutuhan pangan	90 %	- %
			4. Persentase pemenuhan kebutuhan penampungan/hunian sementara.	90 %	- %
		2. Tersedianya pelayanan untuk korban bencana.	1. Persentase pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan	90 %	- %
			2. Persentase pemenuhan kebutuhan layanan psikososial	90 %	- %
3	Tertanganinya keadaan darurat secara cepat dan tepat	Berkurangnya resiko bencana	1. Penurunan korban jiwa	90 %	- %
			2. Penurunan kerugian harta benda dan infrastruktur	90 %	- %
4	Berfungsinya kembali fasilitas umum dan infrastruktur yang rusak akibat bencana.	Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana.	1. Persentase penanganan rumah rusak akibat bencana	90 %	- %
			2. Persentase perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana.	90 %	- %

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Labuhanbatu.

Sesuai hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

1. Melakukan koordinasi antara BPBD Kabupaten Labuhanbatu dengan Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Utara agar ada keselarasan dalam hal program pembangunan dan penanggulangan bencana melalui pelatihan-pelatihan pengembangan sumber daya manusia, sosialisasi terkait kebencanaan, pembinaan dan pembentukan Desa Tangguh Bencana, penanganan darurat bencana, bantuan penanganan bencana termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

2. Permasalahan dan Hambatan

   Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya tersebut, BPBD Kabupaten Purbalingga menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan BPBD Kabupaten Labuhanbatu terutama pada mitigasi bencana, diantaranya:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Mitigasi bencana belum optimal	1. Kebutuhan untuk penanggulangan bencana belum memadai	1. Terbatasnya peralatan dan perlengkapan logistik penanggulangan bencana; 2. Terbatasnya persediaan bahan logistik penanggulangan bencana
		2. Sumber Daya Masyarakat masih rendah terhadap bencana	1. Belum dibentuknya desa tangguh di semua desa rawan bencana; 2. Jarak Tempuh di daerah rawan bencana cukup sulit dijangkau; 3. Sumber daya aparatur yang terbatas;

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			4. Partisipasi masyarakat terkait kebencanaan masih cukup rendah

3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan BPBD Kabupaten Labuhanbatu

Dalam menyikapi adanya hambatan dan permasalahan di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka BPBD Kabupaten Labuhanbatu berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk meminimalkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi, dengan membuat kelemahan-kelemahan maupun hambatan yang ada menjadi peluang dan tantangan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Labuhanbatu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

a. Faktor Internal:

1) Kekuatan:

- Adanya peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional maupun Daerah (Perda) yang telah mengatur tentang pembentukan BPBD, pelaksanaan Pencegahan kesiapsiagaan dan logistik bencana maupun penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana.
- Adanya dukungan yang cukup dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program-program kegiatan.
- Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antara BPBD Kabupaten Labuhanbatu dengan Dinas/Instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal.

2) Kelemahan:

- Terbatasnya peralatan dan perlengkapan logistik penanggulangan bencana.
- Terbatasnya persediaan bahan logistik penanggulangan bencana.
- Sumber daya aparatur yang berbasis kompetensi teknis dibidang bencana terbatas.

b. Faktor Eksternal:

1) Peluang

- Pembentukan dan pengembangan desa tangguh dalam rangka pengurangan risiko bencana.
- Pemasangan Early Warrning System (EWS) di kawasan rawan bencana.
- Optimalisasi peran Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Purbalingga.
- Pembuatan dokumen Kajian Resiko Bencana.
- Pembuatan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.
- Pembuatan dokumen rencana kontijensi
- Penanganan keadaan darurat yang responsif.
- Perencanaan pemulihan pasca bencana.
- Mengadakan kerja sama dengan Kabupaten / wilayah perbatasan terkait dengan pengurangan risiko bencana.

2) Tantangan

Tingkat risiko bencana Kabupaten Purbalingga didapat dengan menggabungkan indeks ancaman, kerentanan serta kapasitas suatu daerah terhadap suatu bencana tertentu.

4. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis Berikut ini isu-isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu :

a) Kabupaten Labuhanbatu memiliki luas lahan gambut yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kebakaran;

b) Perubahan cuaca ekstrim yang terjadi secara mendadak yang sering mengakibatkan terjadinya longsor, banjir dan angin kencang / puting beliung;

c) Peningkatan partisipasi dan pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan OPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Dari hasil penelaahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan terhadap rancangan awal RKPD terdapat perbedaan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025.

Review Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 terhadap Rancangan Awal RKPD 2025 tertera di dalam tabel sebagai berikut :

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS				**6.408.307.194,00**					**6.110.988.786,00**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		***Tingkat Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan***	**90 %**	**4.057.129.669,54**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Tingkat Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan***	**90 %**	**4.036.103.840,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Labuhanbatu	*Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	90 %	42.616.000,,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Labuhanbatu	*Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	90 %	17.755.200,00	Penyesuaian anggaran terkait Refocusing
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Labuhanbatu	*Terlaksananya kegiatan adminitrasi keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu*	90 %	3.041.227.193,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Labuhanbatu	*Terlaksananya kegiatan adminitrasi keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu*	90 %	3.240.106.967,00	Penyesuaian anggaran kebutuhan belanja pegawai
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Labuhanbatu	*Terpenuhinya komponen penunjang kinerja ASN*	0 %	17.874.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Labuhanbatu	*Terpenuhinya komponen penunjang kinerja ASN*	0 %	0,00	Penyesuaian anggaran terkait Refocusing
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Labuhanbatu	*Tersedianya bahan dan perlengkapan penunjang urusan administrasi perkantoran di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu*	90 %	506.319.876,59,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Labuhanbatu	*Tersedianya bahan dan perlengkapan penunjang urusan administrasi perkantoran di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu*	90 %	406.259.948,00	Penyesuaian anggaran terkait Refocusing
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Labuhanbatu	*Tersedianya bahan dan perlengkapan serta jasa penunjang pemenuhan*	90 %	116.140.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Labuhanbatu	*Tersedianya bahan dan perlengkapan serta jasa penunjang pemenuhan*	90 %	97.690.000,00	Penyesuaian anggaran terkait Refocusing

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			urusan kantor di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu					*urusan kantor di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu*			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Labuhanbatu	*Terlaksananya pemeliharaan BMD kegiatan operasional di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu*	90 %	332.952.599,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Labuhanbatu	*Terlaksananya pemeliharaan BMD kegiatan operasional di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu*	90 %	274.291.725,00	Penyesuaian Anggaran Terhadap Belanja Barang dan Jasa
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		***Capaian Penanganan dan Penanggulangan Bencana***	**90 %**	**2.351.177.524,46**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		***Capaian Penanganan dan Penanggulangan Bencana***	**90 %**	**2.074.884.946,00**	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Kabupaten Labuhanbatu		90 %	309.517.100,46	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Kabupaten Labuhanbatu		90 %	229.404.700,00	Penyesuaian anggaran terkait Refocusing
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Labuhanbatu	*Meningkatnya kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana dalam menghadapi bencana*	80 %	1.565.888.096,00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Labuhanbatu	*Meningkatnya kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana dalam menghadapi bencana*	80 %	1.473.925.306,00	Penyesuaian Anggaran Terhadap Belanja Barang dan Jasa
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kabupaten Labuhanbatu	*Terselenggaranya Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana di Kabupaten*	91 %	286.321.398,00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kabupaten Labuhanbatu	*Terselenggaranya Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana di Kabupaten*	91 %	166.664.940,00	Penyesuaian Anggaran Terhadap Belanja Barang dan Jasa
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kabupaten Labuhanbatu	*Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana Terselenggaranya Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten*	91 %	189.450.930,00	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kabupaten Labuhanbatu	*Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana Terselenggaranya Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten*	91 %	204.890.000,00	Penyesuaian Anggaran Terhadap Belanja Barang dan Jasa

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Penanggulangan Bencana

Rencana aksi nasional merupakan penjabaran Renas PB 2020-2024 secara operasional dari program, fokus prioritas, sasaran dan indikator. Rencana aksi ini sudah merupakan komitmen K/L dan non-K/L terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan demikian rencana aksi baru dapat menjadi sebuah dokumen final setelah dilakukannya renstra K/L yang memunculkan indikator.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada saat tidak terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan pascabencana. Dalam pembuatan perencanaan penanggulangan bencana yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), kegiatan perencanaan penanggulangan bencana yang paling dapat dikaitkan dengan SPPN adalah perencanaan penanggulangan bencana pada saat tidak terjadi bencana. Hal ini kemudian mewujud dalam bentuk Renas PB dan rencana aksi pengurangan risiko bencana. Rencana aksi pengurangan risiko bencana secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggararaan Penanggulangan Bencana. Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana. Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana antara lain:

1. Rencana aksi pengurangan risiko bencana disusun baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah;
2. Di tingkat nasional, rencana aksi pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari

pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BNPB;

3. Rencana aksi nasional ditetapkan oleh Kepala BNPB setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan nasional;
4. Rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Peningkatan upaya-upaya penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi dari berbagai aspek dan tahapan penanggulangan bencana terus dilakukan secara sistematis dan holistik oleh BNPB sebagai pemegang utama mandat UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hal ini juga tidak terlepas dalam upaya penyusunan Renas PB 2020-2024 beserta dengan rencana aksi sebagai acuan implementasi bagi berbagai Kementarian / Lembaga serta para pemangku kepentingan terkait. Sejalan dengan hal ini, pendekatan dan landasan dasar dalam penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Landasan hukum: UU No 2 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta peraturan perundangan lain yang terkait sebagaimana dasar penyusunan Renas Penanggulangan Bencana;
2. Disusun dengan pendekatan partisipatif dan konsultatif dengan Bappenas serta Kementerian / Lembaga terkait (37 K/L), dan pemangku kepentingan terkait, termasuk mitra pembangunan internasional, swasta, media, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta Planas PRB.

b. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Penanggulangan Bencana

Sesuai dengan Pasal 33 UU No. 24/2007 bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Arahan dan prioritas nasional sebagaimana ditegaskan pada RPJMN 2018-2024, pengkajian beragam dokumen seperti RPJMN 2009-2014, Renas PB 2010-2014, dan Rencana Aksi Nasional (RAN PRB) 2010-2012, serta

memperhatikan capaian 5 (lima) tahun terakhir tentang penanggulangan bencana, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka fokus prioritas disusun dan dirumuskan sebagai berikut :

1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana;
2. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan;
3. Peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana;
4. Pemenuhan tata kelola bidang penanggulangan bencana;
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
6. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;
7. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana.

Adapun sasaran penanggulangan bencana, dirumuskan dan ditetapkan untuk tercapainya arah penanggulangan bencana sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2018-2024. Uraian mengenai keterkaitan antara program, fokus prioritas, dan sasaran penanggulangan bencana yang termuat dalam Renas PB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

PROGRAM	FOKUS PRIORITAS	SASARAN PENANGGULANGAN BENCANA
Penanggulangan Bencana	1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana 2. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan	1) Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri di tingkat pusat hingga daerah secara proporsional 2) Terintegrasinya penanggulangan bencana pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah 3) Meningkatnya efektivitas mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana
	3. Peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana	4) Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergi yang

PROGRAM	FOKUS PRIORITAS	SASARAN PENANGGULANGAN BENCANA
		beroritentasi kepada penurunan risiko bencana dengan kearifan lokal dan kemandirian daerah 5) Meningkatnya kemitraan multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
	4. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	6) Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana
	5. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	7) Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif.
	6. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana	8) Tersedianya mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara mandiri, efektif dan bermartabat. 9) Terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
	7. Pemenuhan tata kelola bidang penanggulangan bencana	10) Meningkatnya kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana Untuk melaksanakan program tersebut, pemerintah sesuai dengan kewenangan

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan maka perlu adanya kerangka yang jelas. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama penanggulangan bencana. Adapun rumusan tujuan didalam perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana:

Tujuan	Indikator
1. Terwujudnya Penanganan dan Penanggulangan Bencana 2. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	1. Capaian Penanganan dan Penanggulangan Bencana 2. Nilai SAKIP Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, dan dapat pula diartikan sebagai pernyataan tentang kehendak yang sudah diidentifikasi, dianalisi, dan diekspresiakan secara spesifik untuk menunjukan bagaimana hal itu dapat dicapai dalam waktu dan sumber daya yang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu setahun, sampai lima tahun mendatang. Adapun rumusan sasaran di dalam perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana :

Tujuan	Sasaran	
	Uraian	Indikator
1. Terwujudnya Penanganan dan Penanggulangan Bencana 2. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase capaian Indeks Resiko Bencana Penanggulangan Bencana

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh salah satu dan beberapa instansi pemerintah hasil yang ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu, pada dasarnya program/kegiatan BPBD Kabupaten Labuhanbatuadalah sebagai "pengarah" setiap program pembangunan yang memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan serta pengukuran tingkat keberhasilannya.

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan , tugas dan fungsinya yang terpisahkan dari visi dan misi pemerintah. Sejalan dengan Visi Kabupaten Labuhanbatutahun 2016-2021 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Labuhanbatu Yang Tangguh Menghadapi Bencana", maka program dan kegiatan yang dirancang BPBD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 terdiri dari :

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan :

   a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

   Sub Kegiatan :

   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

   Sub Kegiatan :

   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

   c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

   Sub Kegiatan :

   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

   d) Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Penanggulangan Bencana

a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;

Sub Kegiatan :

- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;

Sub Kegiatan :

- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

d) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. LABUHANBATU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**6.244.369.013,00**	**6.408.307.194,00**	**5.833.320.110,00**	**-411.048.903,00**							**6.605.988.393,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.244.369.013,00**	**6.408.307.194,00**	**5.833.320.110,00**	**-411.048.903,00**							**6.605.988.393,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**6.244.369.013,00**	**6.408.307.194,00**	**5.833.320.110,00**	**-411.048.903,00**							**6.605.988.393,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan**				**90 %**	**90 %**	**4.123.550.953,00**	**4.057.129.669,54**	**3.869.119.124,00**	**274.338.693,00**							**4.397.889.646,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase capaian target perencanaan kegiatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah*				90 %	90 %	42.616.000,00	42.616.000,00	17.755.200,00	-24.860.800,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Kabupaten Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		44.746.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	21.308.000,00	21.308.000,00	7.993.600,00	-13.314.400,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			22.373.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	21.308.000,00	21.308.000,00	9.761.600,00	-11.546.400,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			22.373.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya disiplin dan kinerja ASN si lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah*				90 Persen	90 Persen	3.114.756.669,00	3.041.227.193,00	3.196.995.552,00	82.238.883,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN BPBD		3.324.865.963,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	3.031.836.669,00	2.958.307.193,00	3.114.075.552,00	82.238.883,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			3.226.774.963,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	79.920.000,00	79.920.000,00	79.920.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			94.941.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			1.575.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			1.575.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	58.783.125,00	17.874.000,00	0,00	-58.783.125,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		61.759.341,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	58.783.125,00	17.874.000,00	0,00	-58.783.125,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			61.759.341,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Lancarnya kegiatan perkantoran di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah*				90 Persen	90 Persen	447.670.359,00	506.319.876,59	265.821.447,00	-181.848.912,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN BPBD		468.046.422,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	75.977.559,00	123.547.328,00	87.527.154,00	11.549.595,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			79.777.632,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.999.800,00	25.080.548,59	24.698.293,00	-301.507,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			26.249.790,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	6.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			6.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	13.600.000,00	13.600.000,00	10.880.000,00	-2.720.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			14.280.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				227 Laporan	227 Laporan	327.093.000,00	340.592.000,00	139.216.000,00	-187.877.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			341.439.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya dukungan penerangan dan komunikasi dengan lancar keperluan kegiatan administrasi perkantoran*				90 Persen	90 Persen	116.140.000,00	116.140.000,00	97.690.000,00	-18.450.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN BPBD		137.707.080,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			10.080.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.540.000,00	60.540.000,00	60.540.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			63.567.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	46.000.000,00	46.000.000,00	27.550.000,00	-18.450.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			64.060.080,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*BMD dalam kondisi baik dan layak pakai* *Terwujudnya Kondisi Kendaraan Dinas Jabatan Yang Baik Sehingga Kegiatan Kantor Berjalan Dengan Lancar*				90 % 90 Persen	90 % 90 Persen	343.584.800,00	332.952.599,95	290.856.925,00	-52.727.875,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN BPBD		360.764.040,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	53.187.400,00	53.187.399,95	46.912.125,00	-6.275.275,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			55.846.770,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	257.757.400,00	247.125.200,00	211.304.800,00	-46.452.600,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			270.645.270,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				48 Unit	48 Unit	32.640.000,00	32.640.000,00	32.640.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			34.272.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	-				-	-	**2.120.818.060,00**	**2.351.177.524,46**	**1.964.200.986,00**	**87.280.687,00**							**2.208.098.747,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	280.644.000,00	309.517.100,46	229.404.700,00	-51.239.300,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		268.682.335,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	280.644.000,00	309.517.100,46	229.404.700,00	-51.239.300,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			268.682.335,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Meningkatnya kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana dalam menghadapi bencana*				80 %	80 %	1.554.233.970,00	1.565.888.096,00	1.383.949.346,00	-170.284.624,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu		1.615.071.937,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				1440 Dokumen	1440 Dokumen	110.426.100,00	48.112.000,00	25.016.000,00	-85.410.100,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	12 laporan	1.345.644.120,00	1.358.933.346,00	1.358.933.346,00	13.289.226,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			1.512.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				9 Kawasan	9 Kawasan	98.163.750,00	158.842.750,00	0,00	-98.163.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			103.071.937,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Terselenggaranya Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana di Kabupaten*				91 %	91 %	164.814.910,00	286.321.398,00	144.906.940,00	-19.907.970,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu		174.588.855,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				30 Orang	30 Orang	49.875.000,00	130.768.000,00	57.118.000,00	7.243.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			52.368.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				100 Orang	100 Orang	50.346.912,00	37.779.540,00	27.279.540,00	-23.067.372,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			54.397.455,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				25 Orang	25 Orang	64.592.998,00	117.773.858,00	60.509.400,00	-4.083.598,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			67.822.650,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana Terselenggaranya Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten*				91 %	91 %	121.125.180,00	189.450.930,00	205.940.000,00	84.814.820,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu		149.755.620,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	50.290.000,00	79.148.000,00	46.200.000,00	-4.090.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			65.835.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	20.841.180,00	31.641.180,00	0,00	-20.841.180,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			31.420.620,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	49.994.000,00	78.661.750,00	159.740.000,00	109.746.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			52.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	JUMLAH								**6.244.369.013,00**	**6.408.307.194,00**	**5.643.082.935,00**	**-601.286.078,00**							**6.605.988.393,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan BPBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 merupakan rencana kerja tahun yang disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi organisasi. Sebagai suatu dokumen perencanaan, rencana kerja ini merupakan pedoman bagi BPBD dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) BPBD ini, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPBD. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, rencana kerja ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan bidang dan seluruh staf BPBD, sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Akhirnya Rencana Kerja Perubahan BPBD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Rantauprapat, 08 Oktober 2025

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. Darwin Yusma, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19701003 199101 1 001